

Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020

Jumiati¹, Ahmad Syukron Prasaja², Efni Anita³

^{1,2,3} UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: Jumiatywizela@gmail.com¹, syukronprasaja@uinjambi.ac.id², efnianita@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Ciri utama suatu daerah menjadi suatu daerah yang otonom terletak pada sumber daya keuangan daerah, yaitu harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya keuangan secara mandiri dengan meminimalkan ketergantungannya kepada pemerintah pusat, sehingga penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerah. Hingga saat ini berbagai kebijakan telah ditempuh untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kemampuan daerah di sektor keuangan, karena aspek keuangan daerah penting untuk di telaah lebih lanjut. Tujuan penelitian ini yakni menelaah tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode 2017-2020 dengan menggunakan rasio keuangan daerah diantaranya untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio eaktivitas, dan pengukuran indeks kinerja keuangan pemerintah secara umum. Dengan melalui analisis terhadap kinerja keuangan daerah akan memperoleh deskripsi terkait susunan kinerja serta kegiatan perusahaan dan dapat menjumpai kekurangan pada kinerja keuangan daerah. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yakni metode analisis kuantitatif deskriptif. Jenis sumber pemakaian datanya yakni data skunder. Hasil Analisa memperlihatkan dimana tingkat kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi secara umum berada pada kategori Cukup Baik. Namun diharapkan pemerintah harus lebih mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meminimalkan belanja daerah.

Kata kunci: *Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan, APBD.*

Abstract

The main characteristic of a region becoming an autonomous region lies in regional financial resources, which must have the strength and ability to develop financial resources independently by minimizing its dependence on the central government, so this research is motivated by the existence of local government authorities in managing regional finance. Until now, various policies have been taken to develop and improve the capacity of the regions in the field of finance, because the aspects of regional finance are important to be studied further. This study aims to analyze the Financial Performance APBD Level of the Jambi Province for the period 2017-2020 using regional financial ratios including the independence ratio, effectiveness ratio, growth ratio, activity ratio, and measurement of the government's financial performance index in general. Through an analysis of regional financial performance will get an overview of the company's performance and activities and can find weaknesses in regional financial performance. The method used in this research is secondary data. The result of the analysis show that the level of financial performance of the Jambi Province government in general is in the Fairly Good Category. However, it is hoped that the government should be able to increase local revenue and minimize regional spending.

Keywords: Regional Financial Ratios, Financial Performance, APBD

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya kewenangan otonomi yang merupakan suatu kekuasaan yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengambil keputusan daerah, sehingga dapat mengelola sumber dayanya sebagaimana ketetaan sendiri, prioritas serta kapabilitas daerah. Dalam rangka menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan kewenangan secara luas, akuntabel, serta riil dan proposional untuk dicapai melalui regulasi, alokasi, serta sumber daya nasional yang rasional dan proporsifiskal pemerintah baik pusat maupun daerah. Pembangunan daerah otonom diatur berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang keuangan pusat dan perimbangan keuangan daerah. Menurut pasal 4 peraturan pemerintah No.105 tahun 2000 terkait pengurusan tanggung jawab keuangan daerah, disebutkan dimana pengelolaannya perlu dilaksanakan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan regulasi, tepat guna, transparan, serta efektif dan akuntabel melalui atensi terkait asas ketaatan serta keadilan. Pemerintah daerah mengurus keuangan pada APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana pemerintah daerah tiap tahunnya berkenaan dengan keuangan yang dikaji serta disepakati DPRD serta diptuskaj melalui perda. APBD juga ialah landasan pengurusan keuangan untuk jangka waktu setahun yang mana hitungannya sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Oleh sebab itu, APBD berperan sebagai acuan untuk pemerintah melakukan perencanaan aktivitas bagi tahun rekat yang mana fungsinya membuat APBD menjadibkrusial sebab aktivitas pemerintah daerah tak mampu dilaksanakan apabila tak masuk pada APBD.

Peraturan pemerintah RI No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah instrument serta tata tertib dimana menetapkan tentang standar serta prosedur pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai pedoman pengajian laporan untuk menginformasikan secara relevan berkenaan dengan kedudukan keuangan dan transaksi untuk satu peruodem penyajiannya berorientasi dalam rangka menelaah optimalisasi sumber daya ekonomi vaguvpenyelenggaraab aktivitas aoperasional pemerintah, serta lenyajiannya perlu selaras terhadap peraturan perundangan yang ditetapkan. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pun diberi tuntutan untuk sigap dalam menerima baik tanggungjawab maupun beban mengelola eksistensi sumber dana serta sumber daya dalam menyelenggarakan pelayanan sekaligus pembangunan bagi masyarakat. Selain itu diberi tuntutan dalam melakukan upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah supaya bisa memiliki pelaksanaan pemerintah serta lebih mengoptimalkan pelayanan untuk masyarakat. Kapabilitas daerah untuk melaksanakan otinonibya ditimbang melalui kinerja kruangannyam sebuah alat dalam menganalisis kinerja keuangan pengelolaan keuangan yakni melalui analisis rasio keuangan atas APBD yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan yang diukur ialah wujud kesuksesan maupun gagalnya kinerja operasional terhadap pencapaian keuangan pada periode yang lalu berdasarkan pelaporan keuangan. Karakteristik pada kinerja di sektor publik yakni multidimensi hingga tak dad indicator tunggal sebagai alat yang membuktikan kinerja secara ekstensif lain halnya dengan sektor swasta sebab hasil outputnya oleh sektor publik. Sebagian besar merupakan orhpjt yang tidak berwujud, besaran keuangan pub tak cukup dalam menimbang kinerja sektor publik. Pengukurannya bisa dilaksanakan dalam mencukupi tiga tujuan yakni 1) pengukuran dalam membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan membantu pemerintah fokus pada orientasi serta target program, yang mana akhirnya mampu mengoptimalkan efektivitas maupun efisiensi organisasi sektor publik untuk mempersembahkan pelayanannya; 2)

ukuran kinerjanya yang diterapkan dalam rangka pengelokasian pembuatan kebijakan serta sumber daya; 3) besaran kinerja sektor publik dalam rangka merealisasikan akuntabilitas publik serta menjadikan komunikasi kelembagaan lebih baik.

Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan analisis pengukuran rasio yaitu rasio keuangan daerah diantaranya, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Rasio Aktivitas, dan pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah. Penggunaan analisis rasio sektor public belum banyak dilakukan sehingga melalui teori belum terdapat persetujuan yang bulat terkait kaidah serta nama pengukurannya.

Untuk itu hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi dalam pelaporan anggaran sehingga menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020.

Dalam penelitian Hery Susano (2019) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam memanasikan output yang maksimal pemerintah daerah harus melakukan penghematan anggaran dan alokasi pos anggaran dan penghematan pembiayaan harus menimbang rasio prioritas keperluan daerah dalam realisasikan prinsip Value Of Money secara ekonomis. Dan khususnya pada tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, wujud pendapatan daerah perlu tetap melebihi ketetapan target, perolehan pad yang dimaksimalkan perlu dilakukan lewat berbagai sumber baru yang digali terkait pendapatan daerah ketimbang besaran bantuan dana desa serta peningkatam alokasi belanja modal terkait pengadaan fasilitas ekonomi dan pelayanan publik dalam rangka lebih mengoptimalkan kemakmuran masyarakat.

Perbedaan dalam penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yangtelah dijadikan rujukan penulis adalah pada penelitian sebelumnya sebatas terfokus pada Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Keuanga daerah tanpa menjelaskan kinerjanya secara menyeluruh. Sedangkan untuk penelitian ini penulis menambahkan Indeks Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah dalam menganalisis kinerja keuangan secara umum dan menyeluruh dalam total periode yang diteliti.

METODE

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian yakni teknik analisis kuantitatif deskriptif sebagai metode berlandaskan pada data yang berbentuk angka-angka yang akan diukur menggunakan rasio keuangan daerah dan mendeskripsikan perolehan perhitungan sesuai dengan teori yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Kategori data pada penelitian ini yakni data sekunder yang merupakan perolehan data melalui eksistensi sumber serta data sekunder pada penelitian ini yakni laporan anggaran serta realisasi APBD di tahun 2017 hingga 2020. Teknik analisis data yakni tahapan yang begitu menentukan sebuah penelitian sebab analisis data berguna dalam menarik kesimpulan pengertian yang dihasilkan. Teknik yang digunakan yaotu melalui pemakaian skala keuangan daerah yang terdiri dari beberapa indicator diantaranya:

Rasio Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Yakni rasio yang mendeskripsikan kapabilitas pemerintah daerah untuk mendanai secara mandiri aktivitas atau program pemerintah daerah pelayanan serta pembangunan untuk warga serta mendeskripsikan Pemerintah Daerah yang bergantung kepada sumber dana ekstern.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan penerimaan pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto, 2014

b. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Yakni mendeskripsikan kompetensi pemerintah daerah untuk manifestasikan pad sebagai rencana yang dibuat perbandingan terhadap ketetapan target atas dasar kapabilitas riil daerah..

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria penilaian efektifitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Yakni mendeskripsikan rasio terkait pengeluaran biaya dalam mendapatkan pendapatan dengan penerimaan dari realisasi pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Pemungutan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Tingkat Efisiensi Kinerja APBD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
91% - 100%	Kurang Efisien
81% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

d. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Yakni rasio untuk menimbang besaran atau ukuran kompetensi pemerintah daerah untuk membuat keberhasilan yang sudah diraih menjadi bertahan dan meningkat setiap periodenya, rumusnya yakni:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0} \times 100\%$$

Keterangan :

t0 = tahun sebelumnya

t1 = tahun yang dihitung

e. Rasio aktivitas Keuangan Daerah

Rasio yang mendeskripsikan perbandingan terkait cara pemerintah daerah mengutamakan pengalokasian anggaran untuk belanja baik pembangunan maupun rutin dengan maksimal. Berikut rumus rasio aktivitas :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah (IKKP)

$$\text{IKKP} = \frac{(100 - \text{KF}) + \text{KFC} + \text{PBM} + \text{KSP}}{4}$$

Dengan indikator diperoleh dari :

$$\text{KF} = \frac{\text{DAU} (-\text{Belanja Pegawai})}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\text{KPC} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100$$

$$\text{PBM} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{KSP} = \frac{\text{Total Belanja Pemerintah}}{\text{PDRB}} \times 100$$

Asumsi penilaian terbaik dalam interpretasi indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Ketergantungan Fiskal (KF) *nilai terbaik = 100
- Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPC) *nilai terbaik = 10
- Proporsi Belanja Modal (PBM) *nilai terbaik = 60
- Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP) *nilai terbaik = 20

Tabel 4. Kategori Penilaian IKKP

Kategori	Nilai Kinerja Keuangan
Tidak Baik	<20
Kurang Baik	>20-30
Cukup Baik	>30-40
Baik	>40-50
Sangat Baik	>50

Sumber : jurnal development oleh Ahmad Soleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Bantuan Pemeintah pusat	Persentase hasil	Tingkat kemandirian
2917	2.859,65	13.622,05	20,99%	Sedang
2018	1.656,57	2.754,35	60,14%	Sangat Baik
2019	1.651,09	2.922,49	56,62%	Sangat Baik
2020	1.535,18	2.862,89	53,62%	Sangat Baik

Sumber : data diolah penulis

Dari tabel hasil perhitungan diatas dapat dilihat rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2017 persentase tingkat kemandirian sebesar 20,99% ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi berada pada kategori sedang, pada tahun 2018 persentase tingkat kemandirian sebesar 60,14% dan mengalami peningkatan sebesar 36,15% dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 berada pada kategori sangat baik. Untuk tahun 2019 persentase tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 56,62% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,52% meski mengalami penurunan, namun tungkat kemandirian untuk tahun 2019 masih berada pada kategori sangat baik. Dan di tahun 2020 tingkat kemandirian Kembali mengalami sedikit penurunan sekita 3% dengan hasil 53,62% yang menunjukkan tingkat kemandirian tahun 2020 masih dikategori sangat baik.

Analisis Rasio Efektifitas

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Persentase Hasil	Tingkat Efektifitas
2017	2.859,65 M	2.473,81 M	116%	Sangat Efektif
2018	1.656,57 M	1.494,53 M	111%	Sangat Efektif
2019	1.651,09 M	1.524,64 M	108%	Sangat Efektif
2020	1.535,18 M	1.665,33 M	92%	Efektif

Sumber : Data diolah penulis, 2022.

Dari tabel perhitungan rasio efektifitas diatas, pada tahun 2017 diperoleh rasio efektifitasnya sebesar 116% menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi berada pada kategori sangat efektif. Di tahun 2018 rasio efektifitas menurun menjadi 111% namun masih menunjukkan kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 persentasenya kembali menurun menjadi 108% dari tahun

sebelumnya namun meski demikian masih berada pada kategori sangat efektif. Dan untuk tahun 2020 juga mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya menjadi 92% sehingga rasio ditahun ini berada dibawah 1 atau kurang 100 dimana target penerimaan lebih kecil dari target penerimaan yang ditetapkan namun masih berada di kategori efektif.

Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Persentase Hasil	Tingkat Efisiensi
2017	9.572,98	2.859,65	333%	Tidak Efisien
2018	2.245,56	1.656,57	135%	Tidak Efisien
2019	2.406,64	1.651,09	145%	Tidak Efisien
2020	2.134,61	1.535,18	139%	Tidak Efisien

Sumber: data diolah penulis, 2022.

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi tahun 2017 hingga tahun 2020 rata-rata berada diatas 1 atau persentasenya lebih dari 100% sehingga berada pada kategori tidak efisien, hal ini menggambarkan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengumpulkan PAD (dalam hal ini pajak daerah) belum efisien. Artinya biaya yang dikeluarkan relative lebih besar dari outpu yang dihasilkan belum optimal.

Analisis Rasio Pertumbuhan

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	Penerimaan PAD	Persentase Hasil	Kinerja
2016	2.227,60	-	-
2017	2.859,65	28,37%	Positif
2018	1.656,57	(42,07%)	Negatif
2019	1.651,09	(0,33%)	Negatif
2020	1.535,18	(7,02%)	Negatif

Sumber: data diolah penulis, 2022

Pada tabel diatas, Rasio pertumbuhan pada tahun 2016/2017 sebesar 28,37% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan mengalami pertumbuhan yang positif, sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan yang signifikan dengan tahun 2018 terjadi defisit sebesar 42,07%, tahun 2019 mengalami deficit sebesar 0,33% dan untuk tahun 2020 terjadi deficit sebesar 7,02%. Hal ini menunjukkan bahwa ditahun 2018 sampai dengan 2020 kinerja keuangan mengalami pertumbuhan yang negatif.

Analisis Rasio Aktivitas

Tabel 9. Hasil Perhitungan rasio Aktivitas

Tahun	Belanja		APBD	Rasio Belanja	
	Rutin	Pembangunan		Rutin	Pembangunan
2017	9.542,55	3.913,99	16.872,74	56,56%	23,20%
2018	2.246,06	784,72	4.198,26	53,50%	18,69%
2019	2.407,14	866,50	4.824,37	49,90%	17,96%

2020	2.135,16	642,70	4.430,39	48,19%	14,51%
------	----------	--------	----------	--------	--------

Sumber : data diolah penulis, 2022

Dari hasil perhitungan tabel diatas, pada tahun 2017 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD sebesar 56,56% dan rasio pembangunan terhadap APBD sebesar 23,20%. Di tahun 2018 persentasi rasio belanja rutin sebesar 53,50% dan persentase rasio pembangunan sebesar 18,69%. Untuk tahun 2019 persentase belanja rutin sebesar 49,90% dan persentase rasio belanja pembangunan sebesar 17,96%. Dan di tahun 2020 persentase belanja rutin sebesar 48,19% dengan persentase belanja pembangunan 14,51%. Berdasarkan persentase dari keempat tahun tersebut menggambarkan bahwa tingkat aktivitasnya lebih memprioritaskan belanja rutin disbanding dengan belanja pembangunan.

Indeks Kinerja Keuangan Pemeintah (IKKP)

Tabel 10. Hasil Perhitungan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2018

Tahun	KF	KPC	PBM	KSP	IKKP	Kriteria
2017	73	15	23,19	23,72	33,37	Cukup Baik
2018	98	8	18,68	21,72	36,60	Cukup Baik
2019	99	7,6	17,96	24,16	37,18	Cukup Baik
2020	99	7,4	14,50	25,36	37,18	Cukup Baik

Sumber: data diolah penulis, 2022

Pada hasil perhitungan tabel diatas berdasarkan hasil perhitungan dengan model yang digunakan, diperoleh hasil rata-rata IKKP dari tahun 2017 senilai 33,37, ditahun 2018 senilai 36,60, ditahun 2019 sebesar 37,18, dan ditahun 2020 senilai 36,67. Hal ini menunjukkan bahwa indeks kinerja keuangan Provinsi Jambi secara umum dalam kurun waktu 4 tahun dari periode 2017 sampai dengan 2020 berada pada kategori cukup baik dengan nilai indeks >30. Namun, kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jambi telah ditingkatkan ke arah yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Selama kurun waktu empat tahun dalam periode penelitian tahun 2017-2020 dapat dikatan berada pada kategori cukup mandiri.
2. Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam kurun waktu empat tahun selama periode penelitian tahun 2017-2020 berada pada kategori Tidak Efisien.
3. Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam kurun waktu empat tahun selama periode penelitian tahun 2017-2020 sudah berada pada kategori Efektif.
4. Tingkat pertumbuhan Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam belum bisa dikatakan baik karena dalam kurun waktu empat tahun selama periode tahun 2017-2020 selalu terjadi penurunan.
5. Tingkat aktivitas Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi belum berada pada kategori yang sangat baik karena selama kurun waktu empat periode tahun 2017-2020 pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja rutin dari pada belanja pembangunan.
6. Indeks kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi secara umum selama periode tahun 2017-2020 brada pada kategori Cukup Baik.

Implikasi yang mampu diberikan penulis pada penelitian ini yakni Semakin baik tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi maka akan semakin baik citra Provinsi tersebut dan akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi baik dalam pembangunan maupun pengelolaan Provinsi Jambi. Dan penelitian ini mampu membuat wawasan bertambah begitupula dengan sarana untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian ini adapun sarannya yakni Bagi pemerintah harus lebih cermat dan hati-hati dalam pencatatan laporan APBD yang ingin di publikasikan dan lebih diperlengkap lagi serta lebih terperinci, dan juga diharapkan agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan dalam alokasi dana APBD. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan lebih mampu menjabarkan berbagai faktor yang memberikan dampak pada tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. S. K. (2014). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*, 43.
- Anik Yuesti, NiLuh Putu Sandrya Dewi, dan Igusti Ayu Asri Pramesti. (2020). Akuntansi Sektor Publik,. *Bali: CV Noah Aletheia*.
- Arinta, Kustadi. (1990). Pengantar Akuntansi Pemerintahan. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Atmawati, Lilis. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)*.
- Bastian, Indra. (2002). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Boedi, Soelistijono. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Apbd Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*.
- Dadang Solihin. (2006). Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah,. *Jakarta: PT Artifa Duta Prakarsa*.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hamzah, Andy P, dan N. A. K. (2014). Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan. *Tangerang Selatan: STAN Press*.
- Mahmudi. (2009). Manajemen Keuangan Daerah. *Jakarta: Erlangga*.
- Mailangkay, P P U, S Murni, dan P. V. R. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung*.
- Mamesah. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. *Jakarta: PT Gramedia Pustaka*.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: CV Andi Offset*.
- Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Pratama, Aidil Hada. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Skripsi*.
- Rawis, S D, H Manosoh, dan R J Pusung. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (tahun 2016-2018)*.
- Rosjidi. (2001). Akuntansi Sektor Publik Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode. *Surabaya: Aksara Satu*.
- Rukmana, Wan Vidi. (n.d.). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*.
- Soleh, Ahmad. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi. *Journal Development*.
- Solihin, Dadang. (2006). Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah. *Jakarta: PT Artifa Duta Prakarsa*.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). *Bandung: Alfabeta*.
- Suhardi, Didik. (2017). Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP. . . *Jakarta: KEMDIKBUD*.

- Susanto, Hery. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business* 7, 1.
- Ulum, Ihyaul. (2009). Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar. *Jakarta: PT Bumi Aksara*.
- Yuesti, Anik, NiLuh Putu Sandrya Dewi, dan I. A. A. P. (2020). , Akuntansi Sektor Publik. *Bali: CV Noah Aletheia*.